

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan bagi penulis dalam mendapatkan rujukan dan referensi untuk mengkaji topik dan teori yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian terdahulu sebagai upaya dari peneliti untuk mencari perbandingan dan menemukan pandangan baru yang berguna bagi penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu mampu membantu penelitian dalam memposisikan serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian (Hardani,2020). Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian terdahulu dipergunakan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya agar penelitian yang dilakukan saat ini terbukti orisinalitasnya. Peneliti dalam melakukan penelitian Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Pembangunan Ibu Kota Negara (Studi di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara) menggunakan 8 penelitian terdahulu.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi
1.	Ibu Kota Negara Indonesia -Jurnal: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota -Tahun Terbit: 2020 -Penulis: Maulida Rachmalia Dewi, Elin Diyah Syafitri, dan Ajeng Nugrahaning Dewanti	Pemindahan ibu kota negara adalah salah satu pembangunan nasional yang memberikan dampak serta manfaat positif ke masyarakat didalamnya. Hasil berkelanjutan pada pembangunan nasional dapat terjadi apabila masyarakat terlibat aktif dalam pembangunannya.	Keterkaitan hasil penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu mengenai kesiapan masyarakat Sepaku dan Samboja dalam menghadapi rencana pemindahan IKN. Penelitian saya menekankan pada berbagai tanggapan atau respon

		<p>Keterlibatan masyarakat memiliki kaitan dengan masyarakat terlibat aktif dalam pembangunannya. Keterlibatan masyarakat memiliki kaitan dengan kesiapan masyarakat Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja dalam menghadapi rencana pemindahan ibu kota negara.</p>	<p>masyarakat itu sendiri terhadap pembangunan IKN yang bukan rencana lagi. Maka dari itu tujuan penelitian saya untuk mengetahui berbagai tanggapan masyarakat mengenai pembangunan IKN dan kondisi masyarakat karena pembangunan IKN.</p>
2.	<p>-Judul Jurnal: Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik -Jurnal: Jurnal Trasformative -Tahun Terbit: 2022 -Penulis: Dian Herdiana</p>	<p>Artikel ini ditujukan untuk membandingkan dari kedua alasan tersebut mana yang dianggap tepat untuk dijadikan sebagai dasar pemindahan ibukota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan nyatanya bisa dilakukan dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, implikasi pemindahan ibukota yang didasarkan kepada pemerataan pembangunan.</p>	<p>Pada penelitian ini membahas mengenai pemindahan Ibu Kota Negara sebagai upaya pemerataan pembangunan ataukah mewujudkan tata pemerintahan yang baik, keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu dalam konstruksi sosial masyarakat dalam pembangunan IKN ini tentunya akan muncul berbagai pendapat masyarakat.</p>
3.	<p>-Judul Jurnal: Deforestasi dan Migrasi Penduduk ke Ibu Kota Baru Kalimantan Timur: Peran Sinergis Pemerintah dan Masyarakat -Jurnal: Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat -Tahun Terbit: 2020</p>	<p>Peran sinergis antara pemerintah dan masyarakat, melalui perspektif disiplin kesejahteraan sosial dengan menggunakan pendekatan pengorganisasian masyarakat (<i>community organizing</i>) yakni perencanaan dan kebijakan sosial di mana pemerintah perlu membuat kebijakan penghijauan kembali</p>	<p>Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian saya mengenai dampak pasca pembangunan yang tentunya pembangunan ini akan membuat masyarakat di luar Kalimantan untuk migrasi ke IKN. Hasil penelitan ini menyatakan bahwa kemungkinan masifnya migrasi penduduk tanpa</p>

	-Penulis: Afa Hanum Salsabila dan Nunung Nurwati	bersama masyarakat (<i>community restoration policies</i>) serta pemberdayaan masyarakat melalui <i>locality development</i> .	perencanaan proteksi lingkungan melalui masyarakat itu sendiri nantinya mengakibatkan potensi deforestasi besar-besaran.
4.	-Judul Jurnal: Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial -Jurnal: Jurnal Ilmu Komunikasi -Tahun terbit: 2018 -Penulis: Ferry Adhi Dharma	Hasil Penelitian ini mengenai gagasan konstruksi sosial Peter Ludwing Berger merupakan Seorang sosiolog yang produktif, terutama dalam studi sosiologi pengetahuan. Melalui konsep sosiologi, pengetahuan Berger melihat kenyataan sebagai dua: obyektif dan subyektif. Untuk memahami apa yang nyata bagi masyarakat, Berger membentuk teorinya tentang konstruksi realitas dalam tiga tahap: eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi.	Keterkaitan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian ini yaitu mengenai konsep utama konstruksi sosial yaitu Eksternalisasi, Obyektivasi, dan Internalisasi. Penelitian ini sama-sama menggunakan teori Berger and Luckmann (1990) menggunakan proses dialektis yang dialami oleh manusia melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.
5.	-Judul Jurnal: Relokasi Ibu Kota Negara: <i>Lesson Learned</i> Dari Negara Lain -Jurnal: Jurnal Kajian Wilayah -Tahun terbit: 2019 -Penulis: Nyimas Latifah Letty Aziz	Hasil penelitian ini memberikan gambaran dan analisis tentang rencana relokasi ibu kota negara ditinjau dari pengalaman negara-negara lain. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memetakan persoalan terkait dengan dampak yang muncul akibat dari rencana relokasi ibu kota negara.	Relevansi penelitian yang akan dilakukan dengan hasil penelitian ini yaitu mengenai konsep tata ruang dan manajemen perkotaan yang modern sehingga tercipta smart sustainable capital city yang memiliki SDM yang madani (<i>smart people</i>).
6.	-Judul Jurnal: Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat	Kebijakan pembangunan IKN Nusantara berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 mengenai IKN yang direncanakan melalui 5	Relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai permasalahan legalitas

	<p>-Jurnal: Jurnal Studi Kebijakan Publik</p> <p>-Tahun terbit: 2022</p> <p>-Penulis: Vice Admira Firnaherera dan Adi Lazuardi</p>	<p>tahap Pembangunan mulai tahun 2022 hingga 2045 nanti. Pembangunan yang dipindahkan dari Jakarta ke Sebagian wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara memerlukan kurang lebih lahan seluas 256.142 hektare.</p>	<p>lahan yang ditempati oleh masyarakat adat atau masyarakat Kecamatan Sepaku. Penyelesaian permasalahan tumpang tindih lahan IKN serta relokasi masyarakat adat.</p>
7.	<p>-Judul Jurnal: Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum</p> <p>-Jurnal: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial</p> <p>-Tahun terbit: 2022</p> <p>-Penulis: Yanti Fristikawati</p>	<p>Proses Pembangunan IKN yang dilakukan disebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menimbulkan pro dan kontra. Gagasan atas pemindahan IKN telah disahkan sesuai dengan UU No 3 tahun 2022. Pemindahan IKN meemiliki sisi positif yaitu menanggulangi krisis air bersih di Pulau Jawa, karena dengan berkurangnya penduduk maka akan mengurangi penggunaan air bersih.</p>	<p>Relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini memiliki kesamaan terhadap persiapan masyarakat dalam menyambut Pembangunan IKN. Disamping mempersiapkan SDM yang bagus, namun resiko- resiko terhadap alam juga patut diperhatikan.</p>
8.	<p>-Judul Jurnal: Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara</p> <p>-Jurnal: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik</p> <p>-Tahun terbit: 2022</p> <p>-Penulis: Suryadi Jaya Purnama dan Chotib</p>	<p>Setidaknya dalam proses pembangunan IKN terdapat lebih dari 6 pertimbangan utama mengapa pemindahan IKN perlu direlokasikan. Namun pertimbangan tersebut dirasakan belum cukup untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur.</p>	<p>Relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitiannya membahas aspek yang terpenting apa saja yang perlu dilakukan sebelum meelakukan pembangunan Ibu kota.</p>

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Strategi Pembangunan Ibu Kota Negara Menghasilkan Perubahan Pada Masyarakat

Secara umum pembangunan ini diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa, akan tetapi pada sebagian besar masyarakat, pembangunan selalu diartikan sebagai perwujudan fisik (Fristikawati, 2022). Pokok pikiran pembangunan tertuju pada cita-cita keadilan sosial, maka dari itu pembangunan butuh proses dan tahapan terukur. Tahapan itu harus dapat menyentuh berbagai bidang, yakni pertama ekonomi sebagai ukuran kemakmuran materiil. Kedua adalah tahap kesejahteraan sosial. Ketiga adalah tahap keadilan sosial (Kartono & Nurcholis, 2019).

Pembangunan menurut Durkheim, Weber, dan Marx, dalam pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial hingga pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2020). Secara umum, makna mengenai pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Definisi pembangunan menurut Emil Salim yang mana sebelumnya beliau menjabat sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, 1978-1983), pembangunan berkesinambungan (*sustainable development*) sebagai suatu proses perubahan yang di dalamnya

eksploitasi sumber daya, arah, investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan semuanya dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Easton (1985) mengartikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. (Suparmoko, 2020).

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam pembangunan suatu masyarakat, di antaranya adalah pendekatan ekosistem (Alchin & Decharin, 1979). Pendekatan ekosistem mendasarkan pada beberapa asumsi yang terdapat dalam pembangunan masyarakat. Berikut ini, asumsi-asumsi tersebut:

1. Masyarakat didefinisikan sebagai suatu “tempat” di mana keputusan-keputusan dapat diambil dan usaha-usaha dapat dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan Pembangunan.
2. Pembangunan masyarakat dipertimbangkan dengan adanya perubahan-perubahan di dalam organisasi, tujuan, rencana, dan perilaku masyarakat.
3. Tujuan utama dari pembangunan masyarakat adalah meningkatkan ketersediaan, distribusi, dan penggunaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota masyarakat yang secara naluriah sudah ditentukan (hasrat, keinginan, dan harapan).
4. Informasi merupakan kebutuhan yang penting dalam proses pembangunan masyarakat. Informasi tersebut meliputi, jenis dan jumlah sumber daya yang tersedia, tujuan-tujuan untuk meningkatkan persiapan, penyediaan, dan penggunaan sumber daya, rencana saat ini dan yang akan datang, serta

kegiatan-kegiatan untuk memperoleh, menyiapkan, mendistribusikan, dan menggunakan sumber daya.

5. Sebagai agen perubahan (*agent of change*), masyarakat berada dalam suatu proses perencanaan dan kegiatan untuk memperkenalkan ide-ide yang mempengaruhi rencana orang-orang dan organisasi di dalam masyarakat, pada saat ini dan yang akan datang.

6. Partisipasi para pemimpin dan warga negara dalam mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dalam merencanakan serta menyatakan bahwa program pembangunan adalah hal yang mendasar.

Dalam menjadi negara dengan masyarakat yang tingkat pembangunannya lebih baik maka ada tahapan-tahapannya. Dalam pembangunan Ibu Kota Negara menurut Moeljarto Tjokrowinoto memberikan deskripsi mengenai ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat diantaranya sebagai berikut:

1. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri.
2. Fokus utama adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.
3. Pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan sifatnya fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi lokal
4. Didalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses sosial learning yang didalamnya terdapat interaksi

kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar.

5. Proses pembentukan jejaringan (*networking*) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satu-satunya organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian yang integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal maupun horizontal (Fristikawati, 2022).

Pembangunan IKN dilakukan melalui kebijakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Pengertian dalam Sosiologi sebagai cara menggerakkan masyarakat untuk mendukung sebuah pembangunan. Masyarakat dalam pembangunan IKN berperan sebagai tenaga pembangunan serta dampak dari pembangunan tersebut. Jadi, pembangunan IBU Kota Negara adalah cara memajukan atau meningkatkan nilai yang sudah ada untuk mengarahkan perubahan sosial, dapat mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan sosial sesuai dengan target- target yang telah ditetapkan (Firnaherera, 2022).

Ibu Kota didefinisikan sebagai kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara atau tempat yang menghimpun unsur administratif eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bartolini (2005) mendefinisikan ibu kota negara merupakan komponen yang signifikan menggambarkan identitas nasional, sebagai lokasi kekuasaan suatu negara atau merepresentasikan besarnya kuasa suatu negara, dan juga sebagai titik fokus dari keberadaan kelompok

pendukung, konflik serta kohesi antar kelompok yang membentuk suatu negara/bangsa. (Purnama, 2022).

Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang sedang dibangun diharapkan yaitu Ibu Kota yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Indonesia yang berpenduduk sekitar 237 juta jiwa, memiliki warisan kekayaan sekitar 1100 suku bangsa, 700 bahasa lokal, 300 gaya seni tari, 400 lagu daerah, dan 23 lingkungan adat, hidup sebagai bangsa dan negara dalam berbagai keragaman dan perbedaan yang berjalan baik selama ini, karena didasari oleh Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, dan dibingkai melalui Bhinneka Tunggal Ika. Identitas dan karakter bangsa Indonesia telah ditorehkan para bapak bangsa berdasarkan pemahaman sejarah panjang bangsa Nusantara dalam membangun karakter Indonesia (Monoarfa, 2020).

Membangun dan menata kembali Ibu Kota Negara tentunya memerlukan konsep yang matang dan didasari pada visi jangka panjang bagi bangsa. Pengembangan ibu kota baru biasanya dikaitkan dengan perkembangan isu-isu pembangunan kota dan kebutuhan bangsa yang mendasari pertimbangan pemindahan ibu kota tersebut. Paradigma perencanaan dan pengembangan kota baru selanjutnya hadir sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengembangan ibu kota negara di lokasi yang baru. Paradigma pembangunan kota baru yang berkembang pada abad ini yaitu kota modern dan berkelanjutan. Keduanya dapat memiliki makna yang saling melengkapi bagi kehidupan bangsa kedepannya. (Dewi, 2020)

2.2.2 Model Pembangunan Ibu Kota Negara Pada Negara Berkembang

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di negara berkembang sering kali didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi tantangan-tantangan seperti overpopulasi, kemacetan, dan ketidakseimbangan ekonomi yang dihadapi oleh ibu kota yang ada. Proyek-proyek semacam ini juga mencerminkan aspirasi untuk modernisasi dan pemerataan pembangunan. Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), memastikan bahwa pembangunan kota baru tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi (Brundtland, 1987). Teori Tata Kelola Perkotaan (*Urban Governance*), menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pembangunan (Pierre, 2011). Teori Modernisasi, mendorong pembangunan infrastruktur dan adopsi teknologi modern sebagai katalis untuk pertumbuhan ekonomi (Rostow, 1960).

Model Pembangunan IKN pada negara berkembang berdasarkan beberapa studi kasus dari berbagai negara berkembang memberikan wawasan mengenai praktik terbaik dan pelajaran yang dapat dipelajari:

a. Brasília, Brazil

Brasília adalah salah satu contoh klasik pembangunan ibu kota baru:

- Perencanaan dan Desain: Dirancang oleh arsitek Oscar Niemeyer dan perencana kota Lúcio Costa, Brasília dibangun dengan konsep modernis yang menekankan tata ruang yang efisien.
- Dampak Sosial dan Ekonomi: Meskipun berhasil sebagai simbol modernisasi, Brasília menghadapi kritik karena ketidakadilan sosial dan ketergantungan pada transportasi pribadi (Holston, 1989).

b. Putrajaya, Malaysia

Putrajaya dibangun untuk mengatasi kesesakan di Kuala Lumpur dan mempercepat modernisasi:

- Infrastruktur Hijau: Mengintegrasikan ruang hijau dan danau buatan untuk menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan.
- E-Government: Berfungsi sebagai pusat administrasi dengan fokus pada efisiensi dan digitalisasi layanan pemerintah (Moser, 2010).

c. Naypyidaw, Myanmar

Naypyidaw dibangun sebagai ibu kota baru Myanmar:

- Lokasi dan Keamanan: Pemilihan lokasi yang strategis untuk alasan keamanan nasional.
- Kritik dan Tantangan: Sering dikritik karena menjadi "kota hantu" dengan populasi yang rendah dan minim aktivitas ekonomi (Seekins, 2011).

Faktor-Faktor Kunci untuk Pembangunan IKN yang Ideal yang harus diperhatikan dalam model pembangunan IKN yang ideal:

a. Perencanaan Komprehensif

Perencanaan yang matang dan komprehensif sangat penting untuk memastikan keberhasilan. Dilakukan dengan analisis mendalam mengenai lokasi, dampak lingkungan, dan kebutuhan infrastruktur. Menggunakan desain Urba Tata kota yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

b. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, adalah kunci dilakukan dengan membuka konsultasi public. Hal ini merupakan proses

konsultatif untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Arnstein, 1969). Kemudian dengan menggandeng kemitraan Publik-Swasta, yaitu mengkolaborasi sesuatu dengan sektor swasta untuk pendanaan dan pelaksanaan proyek.

c. Keberlanjutan Lingkungan

Mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap tahap pembangunan. Dengan dilakukan menggunakan energi terbarukan, yaitu meminimalkan jejak karbon dengan menggunakan energi terbarukan. Kemudian, konservasi alam dengan memberikan perlindungan terhadap ekosistem lokal dan keanekaragaman hayati.

d. Infrastruktur dan Teknologi

Pembangunan infrastruktur yang modern dan adopsi teknologi canggih, misalnya menggunakan model *smart city initiatives*. Implementasi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup (Hollands, 2008). Memaksimalkan penggunaan transportasi Publik Jaringan transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.

e. Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Membangun fondasi ekonomi yang kuat dan memastikan kesejahteraan sosial. Diversifikasi Ekonomi yang mendorong berbagai sektor ekonomi untuk memastikan pertumbuhan yang stabil. Melakukan pembangunan sosial, berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup.

Model pembangunan IKN yang ideal pada negara berkembang haruslah holistik dan berkelanjutan, mengintegrasikan perencanaan yang komprehensif,

keterlibatan pemangku kepentingan, prinsip-prinsip keberlanjutan, infrastruktur modern, dan perhatian terhadap kesejahteraan sosial. Dengan mempelajari berbagai contoh dan praktik terbaik dari negara lain, negara berkembang dapat mengembangkan ibu kota baru yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai simbol kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Model yang tepat dalam melakukan pembangunan IKN pada negara berkembang yaitu:

a. *Forest City/ Green City*

Forest City sebagai model perencanaan kota masa depan yang lebih berkelanjutan, terutama dalam memastikan pembangunan Ibu Kota Negara dengan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan kota dan kelestarian alam. Khususnya dalam mempertahankan dan melestarikan fungsi hutan sebagai potensi utama di Pulau Kalimantan (Monoarfa, 2020). Tujuan dari kajian *Forest City* dalam pembangunan IKN yaitu untuk memberikan rekomendasi pembangunan Ibu Kota Negara sebagai, upaya pelestarian hutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Penerapan *Forest City* ini tidak hanya terbatas pada konteks kota saja, namun dapat terintegrasi dengan wilayah sekitarnya untuk mendukung keberlanjutan hutan dan lingkungan secara umum. (Suparmoko, 2020).

Green city merupakan suatu konsep penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan pengembangan kota yang ramah lingkungan. Dibangun dengan memanfaatkan sumber daya air serta energi secara efisien, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu yang lebih efisien, menjamin kesehatan lingkungan, dan mensinergikan lingkungan alami dan buatan.

Pembangunan kota diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kota dan warga kota dalam melakukan mitigasi serta adaptasi terhadap ancaman bencana melalui keseimbangan aktivitas sosial warga, pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan alami. *Green City* dikenal juga sebagai konsep kota ekologis (*Eco City*) dan kota sehat (Mutaqin, Muslim, & Rahayu, 2020).

Forest City merupakan gagasan dalam perencanaan kota yang memiliki karakteristik adanya dominasi vegetasi atau penghijauan di dalam perkotaan berupa *vertical forest* (Guan et al., 2018). Menurut Xu (2020), "*Forest City is a typical urban complex ecosystem that is dominated by forest vegetation which enables the forest to be used in multi-functions and multi-effectiveness*".

Istilah *Forest City* mulai dikenal dalam perencanaan dan pembangunan sejak abad ke-18 di Ohio, Cleveland yang mendapatkan julukan *Forest City* karena kawasan tersebut memiliki pohon yang tinggi. Kemudian, istilah ini sempat diklaim oleh London yang menyebutkan kotanya sebagai *The Forest City* karena berhasil membangun pemukiman di tengah hutan. Pada abad ke-20 istilah ini mulai digunakan terutama di beberapa kota yang dirancang oleh Arsitektur Stefano Boeri dengan konsep perencanaan kota di Cina.

Pendefinisian *Forest City* dalam pembangunan IKN berbeda dengan konsep *Forest City* yang selama ini sudah berkembang di beberapa negara pada deskripsi di atas. Hal ini menjadi berbeda karena lokasi IKN yang berada di dalam sekitar kawasan hutan. Proses pembangunannya perlu difokuskan pada upaya untuk mempertahankan dan merestorasi hutan yang ada di Kalimantan. Penerapan konsep *Forest City* di IKN tidak seperti contoh penerapan konsep di kota lain yang mengutamakan kembali kotanya. Pendefinisian ini merujuk

pada beberapa ciri- ciri misalnya seperti, dominasi vegetasi hutan dan tutupan pohon yang luas karena Kawasan IKN masih relevan dengan kondisi hutan lindung dan kebutuhan pembangunan dari IKN (Mutaqin, Muslim, & Rahayu, 2020).

Forest City yang dibangun untuk IKN di dalam pembangunannya akan dirancang sebagai Kota Hutan yang didominasi oleh bentang lanskap berstruktur hutan atau RTH. Konsep ini memiliki fungsi jasa ekosistem seperti hutan dengan, pendekatan lanskap terintegrasi untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam. *Forest City* dirancang sesuai kondisi alam untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam, dengan tujuan mendukung pembangunan berkelanjutan. Khususnya dalam memaksimalkan penyerapan karbon dan konservasi keanekaragaman hayati, serta mampu dalam pengelolaan lingkungan yang berguna meningkatkan kualitas lingkungan hidup (Purnama, 2022).

Prinsip *Forest City* dalam pembangunan IKN merupakan suatu asas atau pokok dasar, yang memiliki acuan pada pembangunan kota dengan mempertahankan fungsi ekologis hutan (Monoarfa, 2020). Tujuan dari pembangunan diantaranya berguna untuk penyerapan karbon, konservasi keanekaragaman hayati yang ada di Kawasan IKN, serta pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Prinsip ini sebagai usaha perumusan kriteria dan indikator dalam pembangunan IKN. Kriteria digunakan untuk mengukur dasar penilaian atau penetapan dalam mencapai kondisi ideal atau standar. Sedangkan, indikator sebagai komponen atau variabel yang mengindikasikan situasi diperlukan oleh kriteria.

Prinsip dari *Forest City* yang telah disusun oleh KLHK tersebut dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pembangunan IKN secara keseluruhan (Dewi, 2020). Dalam menerapkan prinsip tersebut pembangunan kota perlu disesuaikan kembali agar, penerapannya tepat pada konteks kota yang menjadi contoh penerapan *Forest City* di kota lain. Prinsip *Forest City* mengacu kepada visi pembangunan IKN yang akan menjadi kota paling berkelanjutan, serta *benchmarking* dari beberapa kota dengan menerapkan konsep ini. Berikut merupakan beberapa prinsip *Forest City* yang digunakan untuk Kawasan IKN (Mutaqin, Muslim, & Rahayu, 2020):

1. Konservasi sumber daya alam dan habitat satwa

Dalam pembangunan sebuah kota hendaknya meminimalkan kerusakan ekosistem alami yang ada. Mempertahankan ekosistem alami termasuk habitat alami bagi satwa maupun tumbuhan dan menjamin keberlanjutan dari hutan. Dengan melindungi atau mengkonservasi kembali ekosistem hutan yang berguna dalam perbaikan kualitas lingkungan. Kondisi IKN yang mayoritas lahannya merupakan kawasan hutan, maka perlu menciptakan kota dalam hutan dengan tingkat kepadatan yang menengah untuk memastikan ketersediaan pertumbuhan *biomassa* tetap *canopy*. Hal tersebut dapat menjamin bahwa IKN mendukung Pulau Kalimantan sebagai Paru-paru Dunia.

2. Terkoneksi dengan Alam

Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan kota yang dapat mengakomodasi interaksi antara manusia dengan alam (*Connected with nature*) dan hutan di dalam sekitar kota. Prinsip ini dapat dilaksanakan dengan

menyediakan RTH pada kawasan perkotaan, termasuk koridor hijau di dalamnya. *Connected with nature* dapat diwujudkan dengan dominasi lanskap berupa vegetasi hijau di antara bangunan berupa zona hijau untuk rekreasi dan kehidupan yang saling terintegrasi.

3. Pembangunan yang Rendah karbon

Prinsip ini digunakan untuk mendukung kebijakan nasional mengenai penurunan emisi gas rumah kaca dan memaksimalkan peran pohon maupun hutan dalam penyerapan karbon. Prinsip ini juga digunakan sebagai upaya dalam memperbaiki kualitas udara yang didukung dari penggunaan energi baru yang terbarukan.

4. Pembangunan sumber daya air yang memadai

Prinsip pembangunan sumber daya air ini menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan guna, menjamin ketersediaan dan kualitas sumber daya air di Kawasan IKN. Hal ini karena kondisi ketersediaan air di kawasan IKN tergolong rendah. Penyediaan sumber air dilakukan dengan cara menyediakan penampungan air hujan seperti pembangunan waduk, embung, penggunaan air permukaan yang berasal dari sungai, dan tampungan air lainnya. Dalam pembangunan tampungan air ini perlu disertai pemeliharaan daerah tangkapan air untuk menjaga keberlanjutan sumber air pada tampungan tersebut, dengan melakukan pembangunan berbasis DAS dan perlindungan RTH.

5. Pembangunan terkendali (*Anti-sprawl development*)

Kawasan IKN merupakan kawasan yang memiliki ekosistem sensitive sehingga memerlukan pengendalian dalam pembangunannya. Terutama dalam

pembangunan kotanya, pembangunan ini harus berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan menerapkan pembangunan permukiman yang kompak diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap mobil pribadi.

6. *Community Engagement* atau pelibatan masyarakat

Hal ini karena hutan dan lingkungan memberikan manfaat yang cukup besar kepada masyarakat. Keberlanjutan hutan dan lingkungan sangat bergantung pada kegiatan yang dilakukan oleh manusia atau masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting memberikan pendidikan mengenai lingkungan yang dapat meningkatkan kesadaran dan membantu masyarakat membuat pilihan yang ramah lingkungan.

b. *Smart City*

Smart city atau kota cerdas merupakan pembangunan kota yang berupaya mengelola sumber daya dengan efisien dan efektif, melalui informasi dan dukungan infrastruktur yang dapat diakses masyarakat (Herdiana, Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, 2022). Secara umum *smart city* lebih dikenal sebagai pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Model pembangunan ini memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien. Dengan memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Konsep *smart city* berkembang seiring dengan, perkembangan pola pikir manusia terhadap pengembangan kota yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi.

Kota Cerdas menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan *performance*-nya, mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi, serta untuk terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya. Sedikitnya ada tiga faktor yang berpengaruh dalam Kota Cerdas, yaitu cerdas ekonomi, cerdas sosial, dan cerdas lingkungan. Kota Cerdas (*smart city*) juga didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Prinsip *smart city* memiliki kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat (Caragliu, A., dkk dalam Schaffers,2020:3). *Smart city* memiliki wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.

c. Beautiful City

Beautiful City lebih dikenal dengan istilah *City Beautiful Movement*, merupakan filosofi reformasi kota yang berkembang di dunia arsitektur dan perencanaan kota. Konsep ini sebagaimana dikemukakan oleh Daniel H. Burnham (1910) yang menekankan pada perbaikan kota dengan mempercantiknya (*beautification*). Perbaikan ditekankan pada sektor sanitasi, estetika lingkungan, pembangunan *civic centre*, dan desain bangunan. Burham dan Benetts (1909) menerapkan konsep ini di kota Chicago.

Sistem jaringan jalan dibangun secara diagonal dan melingkar yang dirancang untuk memudahkan pengendara menghindari dari kemacetan. Konsep *beautification* pada pengembangan Ibu Kota Negara dapat dilihat di Amerika Serikat, yang terjadi pada Ibu Kota Washington D.C. Penekanan pada keindahan kota berguna untuk membangun standar moral masyarakat perkotaan melalui harmoni sosial dan kualitas hidup masyarakat. Namun, konsep ini dikritik karena dianggap mengesampingkan upaya reformasi sosial yang sesungguhnya (Monoarfa, 2020).

d. Asas/Prinsip Kelembagaan IKN

Aspek Kelembagaan yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun tata kelola, bentuk, dan susunan pemerintahan Ibu Kota Negara antara lain (Azis, 2019):

1. Aspek Pendekatan Pembangunan

Pembangunan Ibu Kota baru tidak dapat secara efektif dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah dengan pendekatan sektor semata. Apabila pembangunan ibukota baru dilakukan secara sektoral (seperti oleh Kementerian Pekerjaan Umum, atau kementerian yang lain) akan memberikan beban koordinasi sangat besar dan risiko tatap muka sangat tinggi.

2. Aspek *Cross Cutting* Dan Kapabilitas

Ibu Kota baru merupakan wilayah kebijakan yang memiliki *Cross cutting issues* karena menyangkut lintas batas-batas hukum, tugas dan fungsi Kementerian, Lembaga dan Daerah. Pengalaman Ibu

Kota baru merupakan pengalaman yang langka bagi Indonesia, dan kapabilitas penggunaan sumberdaya yang relatif besar.

3. Aspek Keunikan Nilai (*Unique Value*)

Pemindahan Ibu Kota baru merupakan program unik terkait infrastruktur, ekonomi, politik, birokrasi dan lain sebagainya yang harus mampu mewujudkan nilai unik sebagai suatu Ibu Kota baru. Sumber daya pembangunan Ibu Kota baru akan bersumber dari cross funding antara nilai (nilai sosial, politik, dan komersial, dll) dalam satu siklus manajemen.

4. Aspek *Complex Public Financing*

Pembangunan Ibu Kota melibatkan skema pembiayaan yang sangat kompleks dan rantai jenjang yang panjang dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pengelolaan Ibu Kota yang modern dan efektif membutuhkan tata kelola pembiayaan yang memberikan kepastian, fleksibilitas, dan menjamin tata kelola keuangan yang baik.

5. Aspek Pengelolaan Aset Dan Risiko

Pengelolaan Ibu Kota baru yang modern melibatkan pengelolaan aset jangka panjang sesuai dengan siklus organisasi dan kebijakan. Pentingnya integrasi manajemen antara keuangan, pengaturan kelembagaan pembangunan dan pengelolaan, teknis dan kinerja masa depan berkaitan dengan risiko di masa mendatang.

6. Aspek *Complex Organization*

Pengelolaan Ibu Kota baru membutuhkan organisasi publik yang berotoritas khusus yang memiliki mandat dan kewenangan

tertentu. Pengelolaan Ibu Kota baru membutuhkan organisasi publik yang mampu melakukan kerja sama dengan swasta, dan berbagai pihak terkait.

7. Aspek *Multi Window Policy*

Pengelolaan ibukota akan memproduksi kebijakan yang melibatkan banyak pintu dan banyak organisasi. Pengelolaan Ibu Kota membutuhkan mandat organisasi jangka panjang dan status hukum yang jelas dan transparan.

2.2.3 Pembangunan Berkelanjutan Pada Ibu Kota Negara di Negara Berkembang

Pembangunan berkelanjutan menjadi populer setelah dikumandangkan oleh Komisi Brundtland di bawah pimpinan Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland yang bekerja sejak Oktober 1984 sampai dengan Maret 1987. Brundtland melahirkan buku "*Our Common Future*" yang diterbitkan oleh *World Commission on Environment and Development* (Suparmoko, 2020). Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai: "*The human ability of humanity to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs.*" (*World Commission on Environment and Development* dalam Rogers, 2008).

Definisi pembangunan berkelanjutan pada pembangunan IKN dalam arti kuat (*strong definition*) dan berkelanjutan dalam arti lunak (*weak definition*), berkelanjutan dalam arti kuat atau keras menghendaki agar nilai semua modal pembangunan; yaitu nilai modal manusia (*human capital*) ditambah nilai ekosistem sebagai modal alami (*natural capital*) ditambah lagi dengan modal buatan manusia (*human made capital*) tetap atau tidak

mengalami penurunan. Dalam arti lunak pembangunan berkelanjutan memungkinkan adanya substitusi di antara ketiga jenis modal pembangunan; utamanya nilai modal alami kalau berkurang dapat diimbangi dengan peningkatan nilai modal manusia dan modal buatan manusia.

Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan pada pembangunan IKN sebagai upaya sadar dan terencana. Pembangunan dengan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Pembangunan berkelanjutan pada IKN merujuk pada kemampuan sistem- sistem bumi yang beragam, termasuk sistem budaya manusia dan ekonomi, untuk bertahan hidup dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan. (Miller,2020: 6).

2.2.4 Hak *Indigenous People* atas Program Pembangunan Nasional

Pengistilahan masyarakat adat atau *Indigenous People* mulai mendapat perhatian dunia setelah tahun 1950-an, sebuah badan dunia di PBB yang bernama ILO (*International labour Organization*). Istilah *indigenous people* digunakan sebagai sebutan bagi entitas penduduk asli. Di Indonesia *indigenous people* mulai diperkenalkan pada pertemuan bertajuk “Lokakarya Pengembangan Sumberdaya Hukum Masyarakat Adat tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam di dalam Kawasan Hutan”, pada tanggal 25-29 Mei 1993 di Toraja, Sulawesi Selatan. Pada lokakarya tersebut menyepakati “masyarakat adat” sebagai terjemahan *indigenous people*. Masyarakat adat didefinisikan

sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal- usul (secara turun temurun) diwilayah geografis tertentu yang memiliki system nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan wilayah itu sendiri. (Tampubolon, 2020)

Menurut (Hazairin, 1970:44) masyarakat adat didefinisikan sebagai ssebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya. Pengakuan eksistensi masyarakat adat telah dicantumkan dalam Undang- Undang dasar 1945 Pasal 18, yang mana penjelasannya tentang “*zelfbestuurende landschappen*”, yang artinya daerah- daerah swaparaja dan “*volksgemeenschappen*” atau masyarakat adat. Pada hal ini negara berkewajiban menghormati hak- hak usul daerah- daerah bersangkutan. Berdasarkan amandemen UUD 1945 menempatkan isu mengenai masyarakat adat pada Pasal 18 B ayat 2 yang berhubungan ddengan Pemerintah Daerah dan Pasal 28 Ayat 3 mengenai hak- hak asasi manusia. (Haba, 2021)

Berdasarkan realitas budaya masyarakat adat yang ada di Indonesia, entitas masyarakat adat di Indonesia yang tergabung dalam jaringan Gerakan Masyarakat Adat dibawah payung Alinasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Masyarakat adat ternyata cukup beragam dan menunjukkan dinamika yang berbeda- beda. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan terdapat tiga tipe komunitas disebut sebagai “Masyarakat Hukum Adat”.

Sedangkan khusus untuk masyarakat adat yang masuk ke ddalam tipe kelompok ketiga, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor. 111 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 67 Tahun 2000, disebut sebagai

“Komunitas Adat Terpencil” (KAT), yaitu kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar, serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik. Ciri-ciri yang dimaksud yaitu:

- A. Berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- B. Pranata sosial bertumpu pada Lembaga kekerabatan;
- C. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
- D. Masyarakat masih hidup dengan system ekonomi subsisten;
- E. Peralatan dan teknologi masih sederhana;
- F. Ketergantungan pada lingkungan dan sumber daya alam setempat relatif tinggi;
- G. Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.

Problematika yang sering dialami oleh masyarakat adat yaitu mengenai kebijakan- kebijakan negara ssejak Indonesia Merdeka. Pada masa Pemerintahan Orde Lama, hingga politik pembangunan yang dikembangkan oleh rezim Orde Baru dibidang perekonomian ditemukan berbagai kebijakan dan hukum merugikan masyarakat adat. Kebijakan dan hukum tersebut menetapkan alokasi yang secara sepihak memihak menetapkan alokasi dan pengelolaan sumberdaya alam yang Sebagian besar berada di dalam wilayah-wilayah adat. Berbagai peraturan perundang- undangan sectoral, khususnya yang dikeluarkan selama pemerintahan otoriter Orde Baru yang mana kekuasaan tersebut dikontrol oleh Pemerintah.

Undang- Undang mengenai Kehutanan, Pertambangan, Perikanan, Penataan Ruang, Transmigrasi, telah menjadi instrument utama untuk mengambil alih sumber- sumber ekonomi yang dikuasai masyarakat adat dan kemudian pengusahannya diserahkan secara kolusif dan nepotistic kepada perusahaan- perusahaan swasta yang dimiliki oleh segelintir elit politik dan kroni- kroninya. Politik sumber daya alam yang tidak adil ini, sering menimbulkan konflik berdimensi kekerasan yang diwarnai oleh pelanggaran hak asasi manusia di seluruh pelosok Nusantara.

Hak masyarakat adat (indigenous people) dalam pembangunan nasional adalah aspek yang krusial untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa hak utama yang harus diperhatikan dan dijamin:

1. Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam: Kepemilikan dan Pengelolaan Tanah: Masyarakat adat memiliki hak atas tanah dan wilayah tradisional mereka, termasuk hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.
2. Perlindungan dari Penggusuran: Mereka harus dilindungi dari pengambilalihan tanah secara paksa tanpa persetujuan dan kompensasi yang adil.
3. Hak atas Identitas Budaya: Pengakuan budaya dan hak untuk mempertahankan, melindungi, dan mengembangkan budaya, tradisi, dan bahasa mereka.
4. Warisan Budaya: Pengakuan dan perlindungan terhadap situs-situs bersejarah dan warisan budaya masyarakat adat.

5. Hak untuk Konsultasi dan Persetujuan: *FPIC (Free, Prior, and Informed Consent)*. Hak untuk memberikan persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan sebelum adanya proyek atau kebijakan yang mempengaruhi tanah dan kehidupan mereka.
6. Partisipasi dalam Keputusan: Hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka.
7. Hak atas Pembangunan dan Kesejahteraan: Akses terhadap layanan dasar, mendapatkan hak atas akses yang setara terhadap layanan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi.
8. Pembangunan Berkelanjutan: Hak untuk terlibat dalam dan mendapatkan manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
9. Hak atas Pengakuan dan Perlindungan Hukum: Mendapatkan pengakuan resmi, pengakuan hukum atas hak-hak masyarakat adat dalam peraturan dan kebijakan nasional.
10. Perlindungan Hukum: Mekanisme hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak mereka dan memberikan ganti rugi jika hak-hak tersebut dilanggar.

Implementasi dan perlindungan hak-hak ini memerlukan komitmen dari pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa masyarakat adat dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam proses pembangunan nasional. Pendekatan ini tidak hanya menghormati hak asasi manusia tetapi juga memperkaya proses pembangunan dengan perspektif dan kontribusi unik dari masyarakat adat.

2.3 Landasan Teori

2.3.1. Teori Konstruksi Sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman

Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial (*social construction*) oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Berger merupakan seorang sosiolog yang dikenal karena pemikirannya mengenai Sosiologi Agama dan Sosiologi Pengetahuan (Dharma, 2018). Berger juga mengembangkan penelitiannya mengenai teori modernisasi dan teori kemasyarakatan. Berger mulai dikenal karena pemikirannya yang ia tuangkan dalam bukunya bersama Luckman yang berjudul, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York, 1966), pemikiran ini berpengaruh dalam perkembangan konstruksi sosial. Berger dan Luckman mendefinisikan konstruksi sosial sebagai “realitas adalah konstruksi sosial”, jadi realitas memiliki arti yang sama dengan konstruksi sosial. Berger membentuk teorinya tentang konstruksi sosial dalam tiga tahap:

a. Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan suatu proses pencurahan diri manusia ke dalam dunia sosialnya. Dalam proses penyesuaian diri manusia dengan dunia sosio-kulturnya sebagai produk manusia, individu berusaha mencurahkan dunianya baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Pada dasarnya seorang manusia merupakan individu yang sejak lahir akan berinteraksi dengan dunia sosialnya. Eksternalisasi pada hakikatnya berasal dari manusia sendiri, dan merupakan keharusan antropologis, manusia selalu mencurahkan diri ke dalam dunia tempat ia berada (Suliaman, 2019).

Produk dari hasil sosialisasi dan interaksi yang mereka lakukan dalam masyarakat ialah dunia sosialnya.

Tatanan sosial merupakan suatu yang telah ada sebelum perkembangan organisme individu, tatanan sosial berlangsung secara terus- menerus dan terus berulang. Tindakan kebiasaan ini tetap mempertahankan sifatnya yang bermakna bagi individu dan diterima begitu saja. Manusia merupakan sosok makhluk hidup yang senantiasa berdialektika dengan lingkungan sosialnya. Eksternalisasi merupakan momen dimana seseorang melakukan adaptasi diri dengan lingkungan sosialnya hasil aktivitas yang dijalani (Suliaman, 2019). Realitas dunia sosial merupakan pengalaman hidup yang bisa dijadikan sebagai dasar seseorang dalam membentuk pengetahuan atau mengkonstruksikan sesuatu. Realitas juga mendorong seseorang untuk memberikan responsnya terhadap pranata- pranata sosial yang ada, berupa penerimaan, penyesuaian, maupun penolakan (Ngangi, 2019).

a. Objektifikasi:

Objektivikasi merupakan hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. Hasil itu menghadapi sang penghasilnya sendiri sebagai suatu aktivitas yang ada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Melalui proses ini masyarakat menjadi suatu realitas sui generis. Pelembagaan yang dimaksud menurut Berger terjadi Ketika kegiatan manusia mengalami proses pembiasaan atau habituaisasi, karena setiap Tindakan individu akan diulang- ulang yang

menjadi suatu pola Tindakan yang kemudian dipahami oleh pelakunya sendiri (Ngangi, 2019).

Pada objektifikasi berlangsung momen interaksi antara realitas yaitu manusia dengan dunia sosio- kulturanya yang kemudian membentuk intersubjektif dan berlanjut menjadi proses objektifikasi. Kenyataan objektif merupakan realitas diri dari individu dan realitas sosial lainnya yang berada diluar diri individu tersebut. Pada proses ini terjadi pelembagaan dan legitimasi dimana keduanya bertujuan untuk menarik dunia subjektif menjadi dunia objektif melalui interaksi sosial yang dibangun bersama.

b. Internalisasi

Internalisasi merupakan proses internalisasi individu- individu sebagai realitas subjektif menafsirkan realitas objektif atau proses penyerapan kembali dunia objektif, ke dalam kesadaran sedemikian sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial (Suliaman, 2019). Pada proses ini individu akan menyerap segala hal yang bersifat objektif dan kemudian akan direalisasikan secara subjektif. Internalisasi berlangsung seumur hidup setiap orang dengan melakukan sosialisasi. Macam-macam unsur dari dunia yang di objektivasikan akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran.

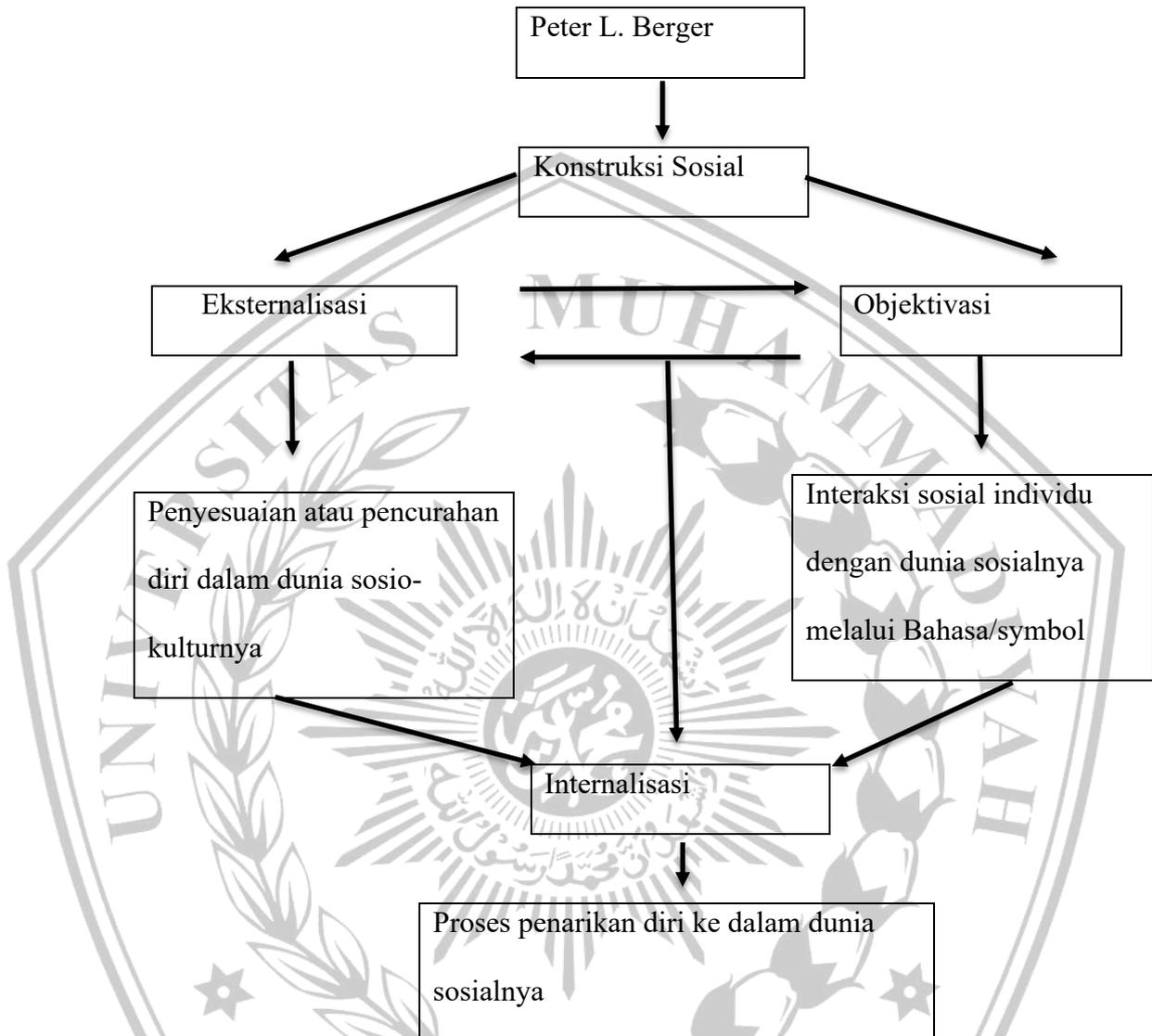
Proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan sekunder (Berger, 1990:130). Dalam proses sosialisasi terdapat adanya *significant others* dan *generalized others*. *Significant others*

berperan dalam mentransformasi pengetahuan dan kenyataan objektif pada individu, orang-orang yang berpengaruh bagi individu merupakan agen utama untuk mempertahankan kenyataan. Proses akhir internalisasi adalah terbentuknya identitas, dan hal ini dianggap sebagai unsur kunci dari kenyataan subjektif.

Pemahaman bahwa “kenyataan” dan “pengetahuan” yang lahir dari konstruksi sosial atas realitas sehari-hari, sangat dipengaruhi oleh individu memahami sesuatu berdasarkan kebiasaan (*habitus*) dan cadangan pengetahuannya (*stock of knowledge*). Penafsiran yang muncul sebagai efek relativitas sosial, penjelasan selanjutnya akan membantu pemahaman bagaimana proses “kenyataan” dan “pengetahuan” itu muncul dan di konstruksi. konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.

Dalam sosiologi pengetahuan atau konstruksi sosial Berger dan Luckmann 1990, manusia dipandang sebagai pencipta kenyataan sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana kenyataan obyektif mempengaruhi kembali manusia melalui proses internalisasi (yang mencerminkan kenyataan subjektif). Dalam konsep berpikir dialektis (tesis-antitesis-sintesis), Berger memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat. Karya Berger ini menjelajahi berbagai implikasi dimensi kenyataan obyektif dan subjektif

dan proses dialektis obyektivasi, internalisasi dan eksternalisasi (Prasaja, 2019).



Gambar 2. 1 Kerangka Teori

2.3.2 Konstruksi Sosial dalam Pembangunan IKN

Persepektif konstruksi sosial memandang pembangunan IKN sebagai sebuah pandangan dalam suatu proses usaha untuk mencapai tujuan yang lebih baik, namun menimbulkan beragam respons atas realitas sosial yang terajadi di masyarakat. Dengan konstrukssi sosial, maksudnya bahwa pembangunan IKN tidak sstatis, mereka tidak selalu merupakan produk dari kondisi yang mudah diidentifikasi, terlihat atau objektif (Hannigan, 1995

dalam Taylor, 2000). Beragamnya bentuk respons terhadap pembangunan IKN merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh media, serta interaksi lainnya dengan orang-orang. Membahas mengenai pembangunan IKN dari sikap dan perilaku masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, dampak yang dihasilkan atas pembangunan, pembangunan berkelanjutan, dan keinginan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan.

Kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat utamanya masyarakat lokal (*indigenous people*) memahami pembangunan IKN, mengidentifikasi kebijakan mengenai pembangunan dengan mengembangkan makna ke dunia sosial mereka (Best, 1989 dan Hannigan, 1995 dalam Taylor, 2000). Budaya masyarakat terkait saling terikat satu sama lainnya dalam memaknai realitas sosial. Secara konseptual mereka berhubungan dengan proses dimana makna melekat pada objek dan tindakan. Budaya mengacu pada kepercayaan dan pemahaman mereka sebagai masyarakat lokal yang mengetahui lokasi pembangunan IKN di tempat tinggal mereka, mengacu pada kepercayaan bersama. Ideologi merupakan keyakinan yang digunakan untuk membenarkan, menantang, dan menafsirkan dunia sosial, kemudian digunakan untuk menilai kondisi sosial dan tindakannya.

2.3.4 Kerangka Berfikir

Uraian teori dan definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat dijadikan dasar untuk melihat bagaimana konstruksi sosial masyarakat terhadap pembangunan IKN. Dimana yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Sepaku, Kabupaten Paser Utara. Sebagai Kawasan yang mendapatkan dampak langsung atas pembangunan IKN, karena lokasi titik nol berada di kecamatan tersebut. Dari situ juga dapat

dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui faktor- faktor yang membentuk konstruksi sosial di masyarakat. Tentunya berbagai macam bentuk konstruksi sosial ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari faktor internal maupun eksternal seseorang, kemudian menjadi pandangan mereka mengenai pembangunan IKN.

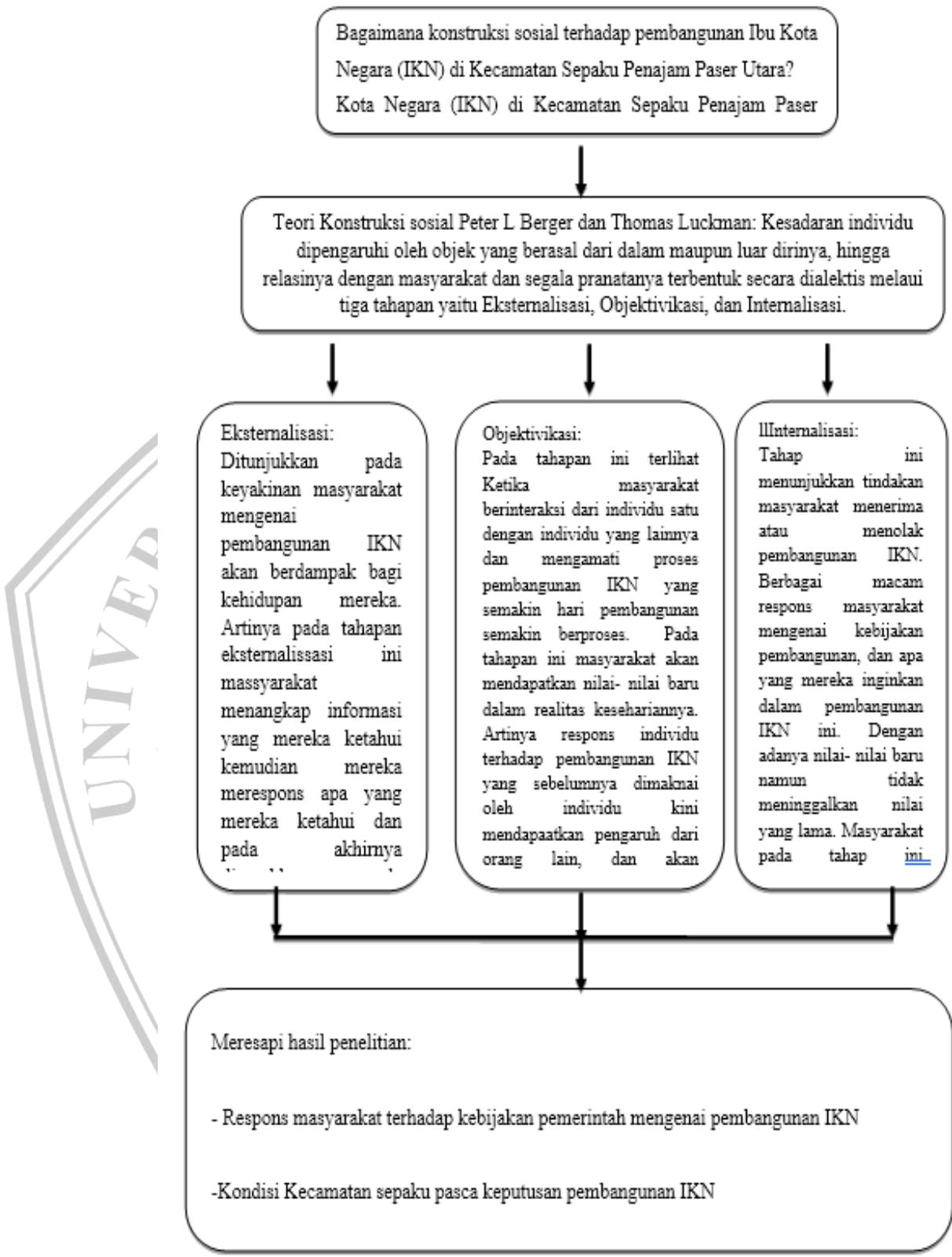
Keseluruhan pengalaman manusia tersimpan dalam kesadaran yang ia miliki, meengendap dan aakhirnya dapat menjadi pemahaman dirinya terhadap Tindakan yang mereka lakukan di dalam konteks kehidupan sosialnya dan melalui proses pentradisian. Kemudian, pengalaman yang terendap dalam pikirannya dalam tradisi yang kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Pengalaman- pengalaman tersebut terbentuk melalui beberapa proses yaitu eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi. Tahap eksternalisasi setiap orang diperoleh dari manusia- manusia yang memiliki kesadaran, yang mana individu mengeluarkan, menampakkan, dan mengemukakan semua keinginannya. Proses ini diartikan sebagai suatu proses pencurahan pemikiran individu secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mental.

Momen objektivikasi merupakan momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lainnya, manusia ddisatu sisi dan realitas sosio kulturalnya disisi lain. Kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubjektif. Pada proses ini merupakan hasil kenyataan eksternalisasi yang kemudian menjadi suatu kenyataan objektif. Kemudian pada tahapan internalisasi, yaitu proses penerimaan definisi situasi yang disampaikan oleh orang lain tentang dunia institusional. Dengan

diterimanya definisi tersebut, seseorang tidak hanya mampu memahami definisi orang lain melainkan lebih dari itu, dan terus mengkonstruksi definisi secara bersamaan (Dharma, 2018).

Pemahaman dalam proses konstruksi inilah yang pada akhirnya membentuk sebuah pola perilaku masyarakat terhadap suatu objek yang dalam penelitian ini berupa, pembangunan IKN. Kelompok- kelompok dalam masyarakat memahami, menanggapi, dan mengidentifikasi pembangunan IKN terhadap kehidupan kedepannya. Pemahaman ini terbentuk melalui proses yang dipengaruhi oleh gejala- gejala atau stimulus yang berasal dari dalam maupun luar individu. Stimulus tersebut mengendap dalam pemikiran setiap orang melalui proses eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi hingga membentuk sebuah konstruksi.

Teori konstruksi sosial Berger dan Luckman ini pada penelitian Konstruksi Sosial Masyarakat dalam Pembangunan Ibu Kota Negara studi kasus di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, digunakan untuk melihat sebuah pernyataan keyakinan (*a claim*) dan juga sebuah sudut pandang (*a viewpoint*) masyarakat Kecamatan Sepaku. Pembangunan Ibu Kota yang menimbulkan pro dan kontra di tengah kehidupan masyarakat, utamanya yang akan berdampak langsung adalah masyarakat setempat di KIPP atas pembangunan IKN. Teori konstruksi sosial ini digunakan untuk melihat hubungan dengan orang lain yang diajarkan oleh kebudayaan dan masyarakat (Ngangi, 2019).



Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir Teori Kontruksi Sosial